

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan hutan oleh masyarakat di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Ketertarikan peneliti mengenai masalah pengelolaan hutan di Kabupaten Samosir berawal pada saat peneliti berkunjung ke daerah tersebut dan melihat bahwa kawasan hutan yang tadinya masih padat ditumbuhi pepohonan kini telah berubah tandus karena terbakar.

Berdasarkan pengalaman peneliti yang pernah berkunjung ke daerah tersebut, diperoleh informasi dari penduduk sekitar hutan yang terbakar tadi bahwa, hutan tersebut sengaja dibakar karena tidak produktif lagi. Hasil dari kegiatan pembakaran hutan tersebut diharapkan dapat memicu tumbuhnya rumput-rumput dan tunas-tunas pohon yang baru. Rumput-rumput baru inilah yang kemudian akan menjadi makanan ternak penduduk setempat.

Peneliti memperoleh informasi awal bahwa penduduk setempat juga memanfaatkan lahan hutan untuk tempat berladang mereka dengan cara pembakaran. Tentunya cara pengelolaan hutan dengan proses pembakaran menjadi suatu perdebatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Apakah memang hanya melalui proses pembakaran sajakah baru bisa diperoleh lahan yang bagus untuk tempat penggembalaan ternak dan tempat perladangan masyarakat? Secara linear kedua latar belakang kejadian ini menjadi suatu tanda

tanya besar bagi peneliti yang menggarisbawahipengelolaan lahan hutan di Kabupaten Samosir dengan cara pembakaran.

Penelitian mengenai pengelolaan hutan di Samosir sebelumnya telah dilakukan oleh D. Gerorge Sherman. Di dalam tulisannya Sherman membahas mengenai pengelolaan lahan oleh masyarakat Batak. Dijelaskan bagaimana masyarakat memanfaatkan padang rumput yang luas sebagai lahan untuk memperoleh makanan ternak dan menjadi tempat pembukaan lahan perladangan¹.

“Orang-orang desa tahu bahwa sapi-sapi mereka menyukai tunas-tunas muda alang-alang: meskipun mereka tidak mengetahui bahwa kadar protein dari tunas-tunas ini adalah lebih tinggi daripada yang terdapat dalam alang-alang yang sudah tua (Soewardi dalam Sherman. 1974).

Untuk melakukan pengelolaan hutan tersebut masyarakat di Kabupaten Samosir lebih fokus pada proses pengelolaan dengan cara pembakaran saja. Secara ekonomis, dari pembakaran memang ada dampak positif yang diperoleh masyarakat yaitu masyarakat tidak perlu susah-susah menghabiskan uang dan tenaga untuk mengolah lahan. Namun, dari kejadian ini sebenarnya efek yang ditimbulkan malah akan kontradiktif dengan hasil yang didapat karena efeknya malah akan mempersulit pertumbuhan tunas pohon.

Pertumbuhan tunas pohon akan mati disaat terjadinya pembakaran. Sementara alang-alang hanya akan mati untuk sementara karena memiliki akar yang kuat. Seperti yang dikatakan oleh G Gherman pada buku Michael R. Dove yang berjudul “ *Manusia Dan Alang-Alang Di Indonesia*” bahwa hal ini juga

1. D.George Sherman. Mitos Gunung Hijau: Ekologi dan etnologi penggarapan Padang Rumput Oleh Masyarakat Batak dalam M. Dove *Manusia dan Alang-alang Indonesia*.

dipersulit dengan penebangan hutan yang dilakukan tanpa *bero* panjang sehingga rumput ilalang mendominasi kawasan hutan.

Lokasi hutan yang menjadi tempat dilakukannya “pembakaran” oleh masyarakat untuk kebutuhan makan ternak maupun perladangan ini memang diakui oleh masyarakat sebagai hutan milik mereka yang diwariskan oleh nenek-moyang mereka secara turun-temurun. Masyarakat tersebut masuk kedalam kategori masyarakat hukum adat dimana di dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa hak masyarakat hukum adat adalah:

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Persepsi masyarakat di Kabupaten Samosir yang menganggap bahwa tanah beserta hutannya adalah milik mereka sendiri hampir sama dengan persepsi masyarakat lereng Gunung Merapi dalam tulisan Handojo Adi Pranowo (1985 hal:55) dalam bukunya yang berjudul “*Manusia Dan Hutan*”. Peneliti

mengetahui seperti dilansir di banyak media masa² bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Samosir disebabkan oleh pembakaran dan penebangan ilegal yang terjadi secara masif. Banyak tuduhan yang ditujukan kepada para pelaku “pengerusakan” hutan di Kabupaten Samosir.

Pembahasan mengenai pengelolaan hutan di dalam penelitian ini didasari oleh pemahaman mengenai ekologi hutan. Hutan merupakan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 1 ayat (2))

Sedangkan ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Indriyanto, 2012:2). Sehingga dari definisi tersebut ekologi hutan dalam hal ini dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dan hutan.

Hutan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hutan yang berada di wilayah teritorial Kabupaten Samosir secara keseluruhan. Sesuai data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008 hutan di Kabupaten Samosir terbagi atas dua bagian berdasarkan fungsinya yaitu hutan produksi 33.950 Ha dan hutan lindung 33.473 Ha.

Seperti diketahui oleh masyarakat luas, hutan merupakan sumber daya alam yang menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat dalam pemenuhan

2. http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/08/07/110156/penebangan_liar_hutan_ancam_lingkungan_samosir/#.VFr2alfNwqU, <http://www.antarasumut.com/kerusakan-hutan-ancam-samosir/>, <http://hariansib.co/view/Marsipature-Hutanabe/24518/Sejumlah-Turis-Mancanegara-Minta-Usut-Pelaku-Pembakaran-Hutan-Samosir.html#.VFr38lfNwqU>

kebutuhan. Kebutuhan akan sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya hubungan timbal balik antara manusia dengan hutan. Hutan sebagai paru-paru dunia adalah ungkapan yang wajar dan sangat logis untuk ditafsirkan.

Sebagaimana hutan memproduksi oksigen untuk kehidupan manusia dan hewan. Pohon-pohon yang dikelola oleh manusia digunakan sebagai bahan pelengkap bagi kehidupan manusia seperti membangun rumah, kayu bakar, membuat perabotan rumah tangga yang hampir kesemuanya bersumber dari kayu hutan. Akan tetapi kegiatan eksploitasi hutan yang berlebihan (deforestasi hutan) akan merusak hutan itu sendiri dan dampaknya sudah pasti sangat buruk bagi hidup manusia.

Untuk itulah penelitian ini dianggap penting guna memberikan pengetahuan serta gambaran kepada kita semua bagaimana manusia mengelola hutan. Banyaknya buku-buku serta artikel yang memuat pembahasan mengenai pengelolaan hutan juga menjadi bukti bahwa kajian tentang pengelolaan hutan ini memang penting untuk digali lebih dalam.

Seorang antropolog yang bernama Roy Ellen menuliskan bahwa manusia yang hidupnya mengandalkan hutan secara aktif mengubah hutan. Sebagian besar hutan hujan tropis di daratan rendah Indonesia dan di tempat lain merupakan hasil dari interaksi dan modifikasi oleh manusia yang selektif selama beberapa generasi untuk mengoptimalkan kegunaannya dan meningkatkan keragaman hayatinya. Hasilnya adalah proses ko-evolusi (evolusi yang berlangsung bersamaan), pola tertentu dalam pengambilan hasil hutan dan

modifikasi hutan sering dipandang sebagai bagian integral bagi masa depan yang berkelanjutan.

Bagi sejumlah pakar, bukti perubahan yang dilakukan dengan sengaja dan bukannya pengaruh manusia yang menemukan sesuatu tanpa sengaja itulah yang begitu menarik perhatian sehingga timbul istilah dan deskripsi tentang hutan yang 'dikelola' (Ellen, 2002:214)³. Merujuk dari apa yang dikatakan oleh Ellen mengenai hutan yang 'dikelola' maka muncul pertanyaan-pertanyaan baru yakni siapa yang mengelola? bagaimana cara mengelolanya? dan cara apa saja yang dilakukan dalam mengelola hutan? Tentunya jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya akan menggambarkan bagaimana sesungguhnya pengelolaan hutan itu dilakoni oleh masyarakat.

Penelitian mengenai pengelolaan hutan ini didasari atas pola perilaku yang terjadi di lapangan. Banyak dari masyarakat Kabupaten Samosir menggantungkan kehidupannya dari hasil pengelolaan sumber daya hutan. Hal yang paling menonjol ialah pembakaran hutan dan penebangan hutan yang marak terjadi di Kabupaten Samosir. Pembakaran hutan dalam hal ini dilakukan masyarakat dengan tujuan tertentu. Kebakaran ini terjadi pada bulan-bulan menjelang datangnya musim penghujan disetiap tahunnya. Kebakaran yang secara rutin terjadi ini banyak mengindikasikan adanya kepentingan bagi masyarakat sehingga mereka melakukan pembakaran hutan.

Penelitian mengenai pembakaran hutan ini sudah banyak dilakukan dan ditulis oleh mahasiswa dan para ahli yang terkait dengan kehutanan, sosial dan

3. Tulisan Roy Ellen ini dimuat oleh Tania Murray Li (Penyunting), dalam *Proses Transformasi Daerah Pedalaman Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2002) hal: 214

lingkungan. Salah satu peneliti yang pernah meneliti mengenai pembakaran hutan oleh masyarakat Batak Toba ditulis oleh D. George Sherman di dalam buku *Manusia dan Alang-Alang*. Pembakaran hutan ini menjadi polemik yang setiap tahun menjadi pembahasan pemerintah, masyarakat dan media massa. Kendati demikian, kegiatan pembakaran hutan ini tidak mencapai titik terang dan tetap saja pembakaran hutan terjadi secara berkala.

Tidak hanya pembakaran, penebangan kayu hutan dalam hal ini menurut peneliti juga sangat menarik perhatian dengan adanya kayu-kayu yang diambil masyarakat dari hutan. Masyarakat yang melakukan penebangan hutan tersebut kerap menyatakan bahwa kayu yang mereka tebang merupakan kayu yang diambil dari tanah milik mereka.

Pemerintah dalam hal ini menilai bahwa pembakaran hutan merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan tangan-tangan jahil dan harus ditindak. Namun tidak sekalipun pemerintah mencari solusi dibalik pembakaran hutan. Pemerintah selalu berusaha mengusut dan menghukum para pelaku pembakaran hutan tersebut. Sesuai dengan landasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1991 Pasal 4 ayat 1 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hal ini menempatkan dua paham yang berbeda antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah dengan landasan undang-undang menyatakan bahwa hutan merupakan milik negara sementara masyarakat menyatakan hutan merupakan milik mereka. Fikarwin Zuska (2008:199) dalam bukunya

menyatakan bahwa “Apa yang diharapkan oleh peraturan-peraturan agar dapat terwujud dilapangan, maka lewat relasi-relasi kuasa yang terbentuk dan proses diantara pelaku, peraturan itupun tak semuanya jalan”.

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tentang kehutanan yang seharusnya menjadi dasar pemerintah dan masyarakat dalam bertindak tidak berlaku di lapangan. Relasi kuasa dalam hal ini tidak berjalan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat.

1.2. Tinjauan Pustaka

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang cara pengelolaannya sangat mempengaruhi tatanan hidup masyarakat dalam berbagai hal. Sebelum membahas mengenai pengelolaan hutan itu sendiri, pemahaman tentang defenisi hutan dan sumber daya alam yang terkait dalam hutan ini menjadi penting untuk kita pahami secara rinci. Didalam bukunya, Indriyanto (2012) mencoba memaparkan defenisi mengenai hutan dari beberapa sumber:

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU RI No. 41 Tahun 1999).
2. Hutan adalah lapangan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem (Kadri dalam Indriyanto. 2012).

3. Hutan adalah masyarakat tetumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan luar hutan (Soerianegara dan Indrawan dalam Indriyanto, 2012).
4. Hutan adalah masyarakat tetumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan di permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan dinamis (Arief dalam Indriyanto, 2012)

Defenisi hutan diatas menggambarkan bagaimana kekayaan dan ekosistem yang terdapat didalam hutan. Kekayaan inilah yang menempatkan hutan sebagai salah satu penopang kehidupan masyarakat luas. Pentingnya hutan dalam kehidupan masyarakat dituangkan Rimbo Gunawan dkk didalam tulisannya:

“Hutan bukanlah semata-mata sekumpulan flora dan fauna. Hutan merupakan salah satu landasan ekosistem yang sangat besar peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Hutan menyerap, menyimpan dan mengeluarkan air. Hutan merupakan paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Hutan menjaga dan melindungi tanah dari gerusan air dari sapuan angin. Hutan pun menyediakan makanan, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, dan memberi kehidupan bagi seluruh manusia di muka bumi ini Pendeknya, seluruh fungsi dan kegunaan hutan tidak terbatas dan ternilai bagi kelangsungan hidup manusia” (1998:19-20)

Besarnya peranan hutan terhadap kelangsungan hidup manusia ini menjadikan hutan menjadi salah satu bagian dari lingkungan yang sangat perlu mendapat perhatian. Perhatian dan pemahaman mengenai hutan tidak sebatas apa itu hutan, dimana letak hutan, apa yang dihasilkan hutan. Namun, lebih seperti apa yang disampaikan oleh Indriyanto dalam bukunya:

“Sehingga para ahli ekologi harus mencoba memahami hubungan timbal balik (interaksi) antara tumbuhan, binatang, manusia dan unsur lingkungan lainnya agar bisa menjawab

pertanyaan, misalnya dimana tumbuhan, binatang atau manusia itu hidup, bagaimana mereka hidup dan mengapa mereka hidup dalam suatu habitat” (Indriyanto.2012 : 13)

Untuk itu, masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan harus memahami pengelolaan hutan yang tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Sangat jelas kita ketahui bahwa hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Bila ditelaah melalui defenisi hutan, kita juga dituntut untuk dapat memahami proses-proses alam yang terjadi didalam hutan itu sendiri. Proses-proses alam yang dimaksud, seperti yang dikutip oleh Indriyanto (Arief dalam Indriyanto. 2012) didalam bukunya antara lain sebagai berikut:

1. Proses yang berkenaan dengan siklus air, pengawetan tanah (Hidro-orologis) dimana hutan menjadi tempat penyimpanan air yang akan mengalir melalui sungai dan mata air.
2. Proses pengendalian iklim maupun pengaruh iklim terhadap eksistensi hutan. Unsur-unsur yang terkait didalam hutan, sangat mempengaruhi temperatur, kelembapan, angin dan curah hujan.
3. Proses yang berkaitan dengan kesuburan tanah. Tanah hutan menjadi tempat pembentukan humus dan gudang mineral. Yang dibutuhkan oleh tetumbuhan dan akan mempengaruhi komposisi dan struktur vegetasi hutan yang terbentuk.
4. Keanekaragaman hayati. Hutan merupakan gudang tumbuhan dan binatang yang menjadi suatu sistem yang saling berkaitan. Kerusakan hutan akan mengakibatkan punahnya kehidupan yang terdapat di hutan.

5. Kekayaan sumber daya alam. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia karena dapat menghasilkan sumber alam yang sangat besar bagi negara dan masyarakat.
6. Objek wisata alam. Hutan dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengenal dan mengagumi keagungan Tuhan.

Didalam bukunya, Indriyanto (2012:13-14) mengatakan bahwa adanya kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait hutan sebagai berikut:

“Penebangan, dan pembakaran hutan untuk perladangan, penebangan hutan yang melebihi daya dukungnya, pembukaan hutan untuk pemukiman para transmigran, konversi hutan mangrove menjadi areal pertambakan ataupun penggunaan lainnya, perubahan yang terjadi pada kawasan-kawasan hutan pelestarian alam dan hutan lindung, serta kegiatan pemanfaatan hutan sebagai sumber daya alam lainnya yang cenderung mengubah keseimbangan ekosistem jauh dari kemampuan pemulihannya”

Pengelolaan hutan juga pernah ditulis oleh M R. Dove pada buku *Sistem Perladangan di Indonesia*. Didalam buku ini Dove memaparkan secara rinci bagaimana sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh suku bangsa Kantu di Kalimantan Barat. “Ketika orang Kantu menebas pohon-pohon yang masih muda dan semak-semak, mereka mempergunakan cara yang berlain-lainan. Untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang dekat tanah digunakan cara pukulan tunggal memakai parang dengan cara mambungkukkan pinggang” (Michael R. Dove, 1988:61).

Secara teoritis ekologi hutan membahas mengenai hubungan timbal balik antara masyarakat dan hutan. Di dalam hubungan timbal balik ini terdapat cara-cara masyarakat dalam mengelola hutan. Kemampuan mereka dalam mengelola

hutan ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat menghasilkan cara pengelolaan hutan sendiri oleh masyarakat.

Marvin Harris sebagai penganjur paling cermat dan sangat teoritis mengenai materialisme budaya, telah mengajukan penafsiran materialisme yang mengisyaratkan adanya rasionalitas tersembunyi, berupa adaptasi ekologis, bagi seperangkat praktek kehidupan budaya, yang pada permukaannya melambangkan ketidakrasionalitas manusia dalam selubung budaya (Keesing, 1989). Hal ini menegaskan bahwa adanya tujuan tertentu oleh masyarakat dalam melakukan segala hal, meski terkadang hal yang ditonjolkan merupakan sebuah hal yang tidak rasional.

Adaptasi ekologi ini penting dilakukan oleh masyarakat agar dapat *survive* (bertahan) dengan kondisi lingkungan alamnya. Kenyataan ekologi dimana suatu masyarakat tinggal akan melahirkan suatu budaya tertentu terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan alamnya. Bahan-bahan baku dan bentuk-bentuk sosial dasar yang berhubungan dengan upaya masyarakat untuk mempertahankan kehidupannya dan beradaptasi dengan lingkungannya di dalam pendekatan materialisme budaya Marvin Harris dikategorikan sebagai komponen *infrastruktur material* yaitu terdiri dari teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi (Sanderson, 1995, hal: 60).

Teknologi dalam pengertian ini adalah terdiri dari informasi, peralatan, teknik yang dengannya manusia beradaptasi dengan lingkungan fisiknya (Lanski dalam Sanderson, 1995). Teknologi juga bukan hanya berisikan peralatan atau

objek yang bersifat fisik atau kongkrit saja tapi juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan dengan cara tertentu (Sanderson, 1995). Ekonomi adalah sistem yang teratur dimana barang dan jasa dihasilkan, didistribusikan dan dipertukarkan antara individu dan masyarakat.

Ekologi meliputi keseluruhan lingkungan fisik dimana manusia harus beradaptasi dengannya yang meliputi tanah, sifat iklim, pola hujan, sifat kehidupan tanaman dan binatang, serta ketersediaan sumber daya alam. Ekologi merupakan lingkungan eksternal dimana sistem sosiokultural harus menyesuaikan diri tapi faktor ekologi acapkali menjadi determinan krusial bagi berbagai aspek kehidupan sosial, maka ekologi diperlakukan sebagai komponen dasar sistem sosiokultural. Faktor demografi meliputi sifat dan dinamika penduduk manusia. Kepadatan dan jumlah penduduk, pertumbuhan, kemerosotan atau stabilitasnya serta komposisi umur dan jenis kelamin merupakan hal yang penting diketahui dalam mengkaji suatu masyarakat. (Sanderson, 1995)

Dilihat dengan pendekatan materialisme budaya Marvin Harris ini maka, hutan merupakan faktor ekologi bagi masyarakat Batak Toba di Kabupaten Samosir dimana sebagian masyarakatnya beradaptasi agar dapat bertahan hidup. Sedangkan yang menjadi faktor teknologi disini adalah segala informasi, teknik, peralatan dan pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam mengelola atau memanfaatkan hutan untuk keberlangsungan hidupnya.

Sementara faktor ekonomi adalah apa yang menjadi bentuk adaptasinya misalnya peladang, bagaimana sistem ekonomi pada peladang terkait dengan barang dan jasa dihasilkan, distribusi dan dipertukarkan. Demikian juga

demografi/kependudukan dilihat sebagai komponen dalam infrastruktur material yang akan mempengaruhinya.

Sumber daya alam, dalam hal ini adalah hutan berada dalam bentangan tanah yang terus akan mengalami desakan seiring dengan bertambahnya penduduk dimana masyarakat sebagai pengelola hutan. Desakan itu terkait dengan kebutuhan hidup manusia itu sendiri apakah karena bertambahnya penduduk maka diperlukan lahan untuk pemukiman, pertambahan lahan untuk perladangan, kebun atau lain pemanfaatan dalam rangka keberlangsungan hidupnya. Di samping karena ada kebutuhan masyarakat juga ada kepentingan lain yakni dari sudut pandang pemerintah.

Diketahui bahwa pemerintahan Kabupaten Samosir memiliki peraturan daerah terkait dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Samosir yakni Peraturan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak di Kabupaten Samosir. Peraturan Bupati Kabupaten Samosir ini menempatkan bagaimana tata usaha pengambilan kayu dari hutan baik hutan hak atau hutan negara.

Selain hal itu, penetapan wilayah kelola hutan masyarakat dan negara masih simpang siur. Sehingga ada pertentangan antara masyarakat dan pemerintah soal status hutan. Dimana di satu sisi masyarakat mengakuinya sebagai haknya dan di sisi lain pemerintah menyatakan itu termasuk hutan negara.

1.3. Rumusan Masalah

Hutan dan masyarakat harus dipahami sebagai suatu sistem yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Suatu hubungan yang sangat berkaitan antara masyarakat sebagai pengelola hutan dan hutan yang menghasilkan sumber daya alamnya. Sesuai dengan pengertian tentang sistem. Saat satu bagian dari sistem tersebut jika tidak berjalan dengan baik, maka semua sistem akan mengalami gangguan. Sistem yang dibangun masyarakat terhadap hutan merupakan sebuah cara dalam pengelolaan hutan. Cara pengelolaan hutan yang secara terus menerus di masyarakat, menghasilkan sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang secara turun-temurun dijalankan oleh masyarakat dengan perubahan-perubahan yang dilakukan sebagai sebuah cara dalam beradaptasi.

Setiap masyarakat adat sebagai pelaku pengelolaan hutan juga memiliki cara, tujuan dan teknik yang berbeda dalam pengelolaan hutan yang ada disekitar mereka. Tergantung pada apa yang mereka butuhkan. Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat ini sering juga dianggap sebagai sebuah pelanggaran oleh pemerintah daerah. Situasi ini memunculkan pertanyaan dan daya tarik dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana cara masyarakat dalam mengelola hutan di Kabupaten Samosir. Sehubungan dengan hal ini maka dirumuskan beberapa pertanyaan yang lebih rinci sebagai awal dari langkah dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana cara masyarakat dalam mengelola hutan di Kabupaten Samosir?

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Samosir?
3. Masalah apa saja yang ada dalam kegiatan pengelolaan hutan di Kabupaten Samosir?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara dan tujuan masyarakat mengelola hutan dengan adanya larangan-larangan dari pemerintah mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membuka pemahaman masyarakat terhadap sebuah “kegiatan” pengelolaan hutan yang ada di Kabupaten Samosir. Pengelolaan hutan yang selama ini bertentangan antara pemerintah dan masyarakat harus mendapat titik temu agar masing-masing pihak mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan hutan yang baik dan seimbang. Pemahaman mengenai pengelolaan hutan oleh masyarakat di Kabupaten Samosir ini diharapkan menjadi sebuah landasan bagi pemerintah di daerah terkait dalam menjalankan peraturan dan mengambil kebijakan.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat etnografi. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir dan

bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu etnografi berarti belajar dari masyarakat (Spredley, 1997:3). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder maupun data primer melalui observasi dan wawancara.

I.5.1. Observasi

Observasi dalam hal ini merupakan suatu teknik penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Observasi dilakukan di awal penelitian untuk mengamati dan mencermati guna mendapatkan gambaran lokasi dan informasi awal. Pada saat observasi atau pengamatan ini juga peneliti mendapatkan informan pangkal yang akan mengarahkan peneliti kepada informan-informan lainnya guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Observasi saya lakukan dengan mendatangi lokasi yang menjadi tempat pengelolaan hutan oleh masyarakat dan juga berinteraksi langsung dengan orang-orang yang terkait dengan pengelolaan hutan di Kabupaten Samosir.

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (1989:137) sebagai berikut ini:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung. Bukankah pengalaman adalah guru terbaik atau setelah melihat baru percaya. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti

mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang “menceng” atau *bias*.

1.5.2. Wawancara

Wawancara dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari informan baik informan biasa maupun informan kunci. Setiap masyarakat yang berada di lokasi penelitian memiliki kemungkinan sebagai informan biasa apabila dari segi waktu memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Informan biasa ini untuk melengkapi data yang bersifat umum. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada informan-informan kunci yang mengetahui dan memahami pokok permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci dalam penelitian saya ialah Bapak A Sagala (Kepala Desa di Desa Ginolat), Orang tua dari Bapak A Sagala (Tokoh Masyarakat), Kepala Nagari Sagala, R Limbong dan Bapak W Simandjorang (Ketua Dewan Pendiri LSM Save Lake Toba Foundation). Saat melakukan pengumpulan data, informan juga memperoleh data-data sekunder yang berasal dari Dinas Kehutanan, Badan Pusat Statistik Samosir dan sumber lain yang diperoleh melalui website.

Proses pencarian data di lapangan didukung oleh alat pendukung di lapangan yakni alat rekam dan kamera foto/video. Alat rekam membantu peneliti ketika melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh ketika melakukan wawancara tersimpan dengan baik dimana informasi-informasi tidak akan hilang. Peneliti menyadari keterbatasan untuk dapat mengingat semua informasi yang

diperoleh. Alat rekam ini tentu sangat membantu terutama ketika melengkapi catatan lapangan (*fieldnote*) sebagai dasar dalam pengolahan data yang dilakukan. Kamera foto/video bermanfaat untuk merekam peristiwa di lapangan guna mendukung data dan bukti lapangan dan dapat juga memberikan gambaran penelitian ini secara visual.

Melakukan *rappor* merupakan suatu hal yang mutlak di lapangan. *Rappor* bertujuan untuk memperoleh data yang akurat di lapangan. Terjalannya *rappor* memudahkan peneliti dalam menggali data terutama dengan informan-informan. Sehingga hubungan yang baik dilakukan terlebih dahulu agar peneliti tidak menemukan kesulitan karena tidak terjalannya hubungan secara baik yang membuat informan tidak dengan mudah memberikan informasi. *Rappor* yang terjalin membuat informan tidak sungkan dan merasa curiga kepada peneliti yang dapat menghambat dalam perolehan data. Sebagai seorang peneliti, peneliti adalah orang yang sedang belajar yang memposisikan diri tidak tahu apa-apa terkait permasalahan penelitian sehingga informan merupakan guru yang menjadi tempat bertanya.

1.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah proses pencarian data di lapangan dianggap cukup. Proses pencarian data di lapangan dilakukan dengan sistem bola salju (*snowball*). Sedangkan pencarian data dianggap selesai ketika informasi yang diperoleh di lapangan telah berulang-ulang. Untuk keakuratan data juga

dilakukan *crosscheck*(triangulasi) kepada informan untuk memastikan kebenaran data-data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan terhadap data hasil observasi, wawancara dan dari dokumentasi dengan mengklasifikasikan/mengategorikan data yang diperoleh sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini dan menyingkirkan data yang tidak relevan. Sehingga memudahkan untuk dipahami dengan baik. Data yang terkumpul sudah dianggap menjawab permasalahan penelitian kemudian dilakukan analisis dan interpretasi data. Terakhir adalah melakukan rangkuman dari hasil interpretasi data-data yang telah dikumpulkan.

Paparan dari temuan-temuan ini disajikan dalam sistematika penulisan skripsi yang sudah standar. Setiap babnya akan memaparkan data yang sudah diklasifikasi atau dikategorikan sesuai dengan judul setiap bab.

1.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap awal penelitian dilakukan observasi di 3 desa yakni, Desa Sianjur Mula-Mula Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Desa Harian, Kecamatan Harian dan Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta. Setelah dilakukan observasi maka lokasi penelitian akhirnya dilaksanakan di daerah lahan Hutan yang bersebelahan dengan Kecamatan Pangururan, Harian dan Sianjur Mulamula.

Masyarakat yang beraktifitas di hutan tersebut adalah masyarakat yang berasal dari desa-desa sekitar hutan. Berdasarkan hal tersebut lokasi penelitian

tidak berbasis desa tapi berpegang pada status hutan, dimana hutan yang dikelola masyarakat tersebut berada.

1.8. Pengumpulan Data di Lapangan

Proses pengambilan data dimulai dengan mendatangi daerah Tele karena di daerah ini sering terjadi kebakaran hutan. Pada saat itu Saya bertemu dengan seorang Bapak yang bertani di lahan yang bersebelahan dengan hutan negara. Awalnya petani tersebut tidak mau terbuka memberikan informasi. Setelah berbincang-bincang beberapa saat, saya menyampaikan maksud dan tujuan saya dan meminta kesediaan waktu Beliau untuk diwawancarai terkait dengan penelitian skripsi saya. Kemudian Bapak tersebut mengajak saya ke kedai kopi. Di situlah saya melakukan wawancara dengan Bapak petani tersebut.

Setelah wawancara selesai, kemudian saya pergi ke daerah Baniara. Di Baniara saya menjumpai polisi hutan yang menjaga hutan di sekitar Tele. Baniara adalah daerah perbatasan Kabupaten Samosir dengan Humbahas dengan jarak tempuh satu jam lebih. Saya melakukan wawancara di lokasi kerja informan. Selesai wawancara, saya pergi ke Sianjur Mulamula untuk bertemu dengan kepala desa di sana. Namun sesampainya di sana kepala desa yang dimaksud sedang keluar rumah. Sambil menunggu Beliau, saya pergi ke rumah tetangganya yang bermarga Sitindaon dan mengobrol terkait data yang ingin diperoleh. Namun dari pembicaraan itu, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak ini kurang pas untuk dijadikan informan. Bapak tersebut banyak tidak tahu apa yang saya tanyakan dan selalu mengarahkan saya kepada kepala nagari. Beberapa saat kemudian, Bapak Kepala Nagari datang dan wawancara dapat dilakukan kepada

Beliau. Bapak Kepala Nagari ini merupakan salah satu informan kunci dalam penelitian ini.

Kemudahan yang saya rasakan karena orang tua saya tinggal dan bekerja di Pangururan sehingga mengenal baik tokoh-tokoh masyarakat di Pangururan. Beberapa urusan terkait menjumpai informan dan perolehan data dapat kemudahan. Seperti ketika menemui Kepala Desa yang awalnya tidak ada di tempat dengan relasi orang tua yang mengkomunikasikan akhirnya bisa bertemu di kediaman kepala desa dan melakukan wawancara. Ternyata yang dikatakan oleh tetangga beliau sedang keluar adalah bapak dari kepala desa yang juga merupakan tokoh masyarakat/adat yakni sebagai *Raja Parhata* marga Sagala. *Raja Parhata* ini juga kemudian merupakan salah satu informan kunci demikian juga kepala desa Bapak Agus Sagala. Informasi dari *Raja Parhata* banyak yang berkaitan dengan tata cara membuka hutan, larangan, mitos dan pengetahuan lokal lainnya tentang hutan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

Selain mencari data penelitian langsung ke masyarakat, pencarian data juga dilakukan ke dinas-dinas terkait seperti ke Dinas Kehutanan. Data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan adalah terkait kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan hutan di lokasi penelitian, pandangan pemerintah terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan sikap pemerintah terhadapnya.